



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHRUDIN
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 246384

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.355.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m²/64 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 748 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 395 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 2809 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/36 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 2382 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
7. Tanah Seluas 970 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/70 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 61.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, BENELLI SPORT (BS 250) PE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 100.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 82.339.565 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.598.339.565 |
| III. HUTANG | Rp. | 864.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 734.339.565 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.